

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam mengadvokasi kasus korupsi di kota Padang

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang adalah organisasi profesi yang mempertahankan independensi dan kebebasan pers. Aliansi jurnalis independen Padang bertanggung jawab untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terkait kasus korupsi di Kota Padang, AJI melakukan advokasi melalui pemberitaan investigatif, diskusi publik, dan pelatihan jurnalis, serta membangun hubungan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga anti-korupsi, dengan metode ini, AJI Padang tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kendala kendala Aliansi Jurnalis Independen (AJI) padang dalam Mengadvokasi kasus Korupsi di Kota Padang

Dalam melaksanakan tugas advokasinya, AJI Padang menghadapi berbagai kendala yang signifikan, ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis menjadi salah satu tantangan utama, di mana mereka sering mengalami tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus korupsi. Selain itu, akses terhadap informasi sering kali terbatas akibat birokrasi yang tertutup dan minimnya transparansi dari instansi terkait.

Intervensi politik serta tekanan dari pemilik media yang memiliki afiliasi dengan pihak-pihak tertentu juga menjadi hambatan dalam mengungkap kebenaran, terakhir, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi menjadi faktor yang memperlambat proses advokasi dan upaya transparansi yang dilakukan oleh AJI Padang.

B. Saran

1. Peningkatan Keamanan bagi Jurnalis

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan adanya perlindungan hukum dan keamanan bagi jurnalis yang melakukan investigasi kasus korupsi. Mekanisme pelaporan terhadap ancaman dan intimidasi harus diperkuat agar jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut.

2. Mendorong Keterbukaan Informasi, Instansi pemerintah harus lebih transparan dalam memberikan akses terhadap dokumen publik, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek yang menggunakan anggaran Negara, implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik perlu diperkuat agar jurnalis dan masyarakat bisa mendapatkan data yang valid.

3. Kolaborasi yang lebih luas, AJI Padang disarankan untuk terus memperluas kolaborasi dengan lembaga antikorupsi, akademisi, dan masyarakat sipil guna memperkuat upaya advokasi dan memastikan kasus-kasus korupsi tidak diredam oleh kekuatan politik atau ekonomi.

4. Meningkatkan Kesadaran Publik, Perlu adanya upaya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam mengawal kasus korupsi, kampanye publik dan forum diskusi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam mengawal transparansi pemerintahan.
5. Penguatan Etika dan Profesionalisme Jurnalis, AJI Padang perlu terus memperkuat kapasitas anggotanya dalam melakukan investigasi berbasis data yang akurat dan etis agar berita yang disajikan tetap kredibel dan tidak mudah digugat secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta.
- Edy Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, , Jakarta.
- Nurhainir Butarbutar, 2010, *Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Legalitas, Jakarta.
- Hadi Rahman, 2009, *Penegak Hukum Melek Pers*, Lbh Pers, 2009, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, , Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1973, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zeni Zaenal Mutaqin, 2020, *Pengetahuan Dasar tentang Pendidikan Anti Korups dan Integrasi*, CV.Media Sains Indonesia, Bandung.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber lainnya

Jenis jenis Korupsi dan Hukumnya diIndonesia, Artikel ini diakses pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, pukul 13.48 wib, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/#_ftn17

Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara, Artikel ini diakses pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Pukul 15.15 wib. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>

Kenali Dasar Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi, Artikel ini diakses pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 11.25 wib, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Artikel ini diakses, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, pukul 22.16 wib. <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10>

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Artikel ini diakses pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, Pukul 15.14, <https://aclc.kpk.go.id/tapaksiapi-2023-res/daftar-materi/3/3.%20Budhi%20Sarumpaet%20-%20Penangan%20Tipikor.pdf>

Peran BPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Artikel ini diakses pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, pukul 15.50, <https://www.bpk.go.id/news/peran-bpk-dalam-pemberantasan-korupsi>

Sejarah Aliansi Jurnalis Independen, Artikel ini diakses pada hari Senin tanggal 30 September 2024, pukul 09.41 wib, <https://aji.or.id/sejarah>

Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsurnya, Artikel ini diakses pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Pukul 17.00 wib. <https://djp.kemenkeu.go.id>.

Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Artikel ini diakses pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 10.47 wib, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/> .

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Artikel ini diakses pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 16.29 wib. <https://www.icw.or.id/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>

Undang Undang (UU) No.31 Tahun 1999, Artikel ini diakses pada hari kamis tanggal 26 September 2024 pukul 17.21 wib.
<https://peraturan.bpk.go.id/>

Undang Undang (UU) Tentang Tindak Pidana Korupsi, Artikel ini diakses pada hari Jumaat tanggal 27 September 2024, Pukul 11.45 wib,
<https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--uu--tentang-pemberantasan-tindak-korupsi>

D. Sumber Jurnal

Desca Lidya Natalia, 2019, Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Volume 512.472 .

Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto 2019, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol.15, Nomor 1.

Muchamad Catur Rizky, Didit Darmawan, Suwito Suwito, Rio Saputra, 2023, "Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret," *Jurnal Universitas Sunan Giri*, Surabaya, Vol.1.no. 4.

Junaidi Abdullah, 2019, "Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No.1.